

**2025**

**LAPORAN TRANSPARANSI  
PELAKSANAAN  
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

# COMPANY AWARD



***“Sebagai Bank Mitra Program Kemanusiaan Terbaik dengan Produk Cash Waqf Linked Deposit dan Program Wakaf Sumur Pelosok Negeri”***

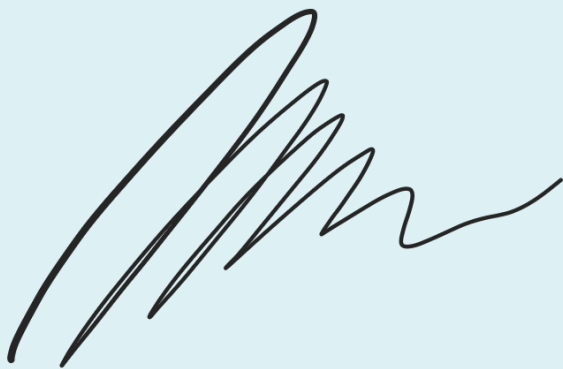


# Daftar Isi

<b>Sambutan .....</b>	<b>03</b>
<b>I. Penjelasan Umum Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola .....</b>	<b>06</b>
<b>II. Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola .....</b>	<b>08</b>
<b>A. Cakupan Tata Kelola .....</b>	<b>09</b>
1. Laporan Penerapan Tata Kelola .....	09
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	10
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	11
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah .....	13
5. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	15
<b>B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola .....</b>	<b>15</b>
<b>C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi .....</b>	<b>26</b>
<b>D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan .....</b>	<b>27</b>
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi .....	27
2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi .....	27
<b>E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain .....</b>	<b>27</b>
<b>F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan .....</b>	<b>28</b>
1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris .....	28
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris .....	29
<b>G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain .....</b>	<b>29</b>
<b>H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain .....</b>	<b>30</b>
<b>I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS .....</b>	<b>32</b>
<b>J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....</b>	<b>33</b>
<b>K. Frekuensi Rapat Komisaris .....</b>	<b>33</b>
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun .....	34
2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris .....	32
<b>L. Frekuensi Rapat DPS .....</b>	<b>34</b>
1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) Tahun .....	35
2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah .....	36
<b>M. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud) .....</b>	<b>36</b>
<b>N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS .....</b>	<b>37</b>
<b>O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan .....</b>	<b>37</b>
<b>P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik .....</b>	<b>37</b>
<b>Q. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait .....</b>	<b>41</b>
<b>Lampiran</b>	
• Profil Dewan Komisaris	
• Profil Dewan Pengawas Syariah	
• Profil Direksi	

# Lembar Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

*(Good Corporate Governance)*



**Mochamad Nizar Mustaqim**  
Direktur Utama



**Dima Audra Djani**  
Komisaris Utama

SAMBUTAN

# DIREKTUR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbil 'Aalamiin, Was Shalatu Was Salamu 'Ala Nabiyyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Sahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du*

Segala puji bagi Allah SWT, Zat Yang Maha Adil dan Maha Mengetahui, atas limpahan berkah-Nya sehingga PT BPRS Hijra Alami ("Hijra Bank") dapat menuntaskan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun Buku 2025. Laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif kepada regulator, melainkan sebuah refleksi atas kejujuran dan dedikasi kami dalam menjaga amanah yang dititipkan oleh para nasabah serta seluruh pemangku kepentingan. Bagi Hijra Bank, Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) adalah ruh dari perbankan syariah. Di tengah akselerasi teknologi keuangan yang kian pesat, kami meyakini bahwa teknologi hanyalah sarana, namun kepercayaan (*Trust*) adalah fondasi utamanya. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2025, kami secara konsisten memperkuat pilar-pilar tata kelola guna memastikan bahwa setiap inovasi digital yang kami lahirkan tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kepatuhan syariah yang mutlak.

Tahun ini, penguatan struktur tata kelola kami difokuskan pada sinkronisasi peran antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sinergi ini terwujud melalui transparansi alur informasi dan peningkatan intensitas pengawasan, termasuk pelaksanaan rapat-rapat strategis yang melampaui ketentuan minimum regulasi.

Menutup sambutan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh insan Hijra Bank yang telah bekerja dengan integritas tinggi sebagai "Garda Terdepan" penerapan kode etik perusahaan dan memperkuat tata kelola untuk mewujudkan ekosistem perbankan syariah yang modern, amanah, dan berdaya saing global.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Mochamad Nizar Mustaqim**

Direktur Utama

SAMBUTAN

# KOMISARIS

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, Was Shalatu Was Salamu 'Ala Nabiyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Sahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga PT BPRS Hijra Alami ("Hijra Bank") dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) untuk Tahun Buku 2025. Laporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai komitmen bank dalam menjalankan operasional yang sehat, beretika, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan periode yang krusial bagi Hijra Bank dalam memperkuat fondasi tata kelola di tengah dinamika industri perbankan syariah digital yang terus berkembang. Kami meyakini bahwa penerapan GCG bukan sekadar pemenuhan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kepercayaan nasabah dan memastikan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kami senantiasa mengintegrasikan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* ke dalam setiap aspek operasional dan pengambilan keputusan.

Dalam laporan ini dapat dilihat bagaimana mekanisme pengawasan internal kami bekerja secara optimal. Hal ini membuktikan komitmen tinggi manajemen dalam memastikan setiap inovasi dan produk Hijra Bank senantiasa selaras dengan prinsip syariah yang ketat. Kami percaya bahwa tata kelola yang baik harus berdampak pada kemaslahatan umat. Kami optimistis Hijra Bank dapat tumbuh menjadi lembaga keuangan syariah yang semakin amanah, profesional, dan kompetitif serta senantiasa dapat melangkah maju membawa keberkahan bagi ekonomi syariah di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Dima Audra Djani**

Komisaris Utama

## SAMBUTAN

# DEWAN PENGAWAS SYARIAH

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, Was Shalatu Was Salamu 'Ala Nabiyina Muhammad, Wa 'Ala Aalihi Wa Sahbihi Wa Sallam, Amma Ba'du.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) menegaskan komitmen penuh untuk memperkuat struktur dan kualitas penerapan Tata Kelola Yang Baik termasuk Syariah di PT BPRS Hijra Alami sebagaimana amanat dari Peraturan Otoritas Jasa (POJK) Nomor 25 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi acuan utama kami dalam memastikan bahwa seluruh aspek bisnis dan operasional Bank berjalan selaras dengan prinsip syariah.

Sepanjang periode laporan ini, DPS telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat secara aktif diantaranya melalui; a) *Kepatuhan Akad*, yakni memastikan seluruh produk dan aktivitas bank sesuai dengan fatwa DSN-MUI. b) *Penguatan Pengawasan*, yakni meninjau efektivitas fungsi kepatuhan, manajemen risiko, dan audit internal syariah sesuai standar regulasi terbaru. dan c). *Mitigasi Risiko*, yakni mengawal pencegahan risiko ketidakpatuhan syariah guna menjaga kepercayaan nasabah dan keberlanjutan Bank.

Kami menilai manajemen PT BPRS Hijra Alami telah menunjukkan integritas tinggi dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola yang transparan dan akuntabel. DPS akan terus bersinergi dengan Direksi dan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah tetap menjadi fondasi utama dalam setiap inovasi dan layanan bank.

Semoga laporan ini memberikan gambaran jelas atas dedikasi kami dalam menjaga amanah dan kepatuhan syariah demi kemaslahatan bersama.

*Wallahu Al Muwafiq Ila Aqam At Thariq,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Bahrudin Moeyansyah**

Ketua Dewan Pengawas Syariah

# PENJELASAN UMUM

## LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

---

PT BPRS Hijra Alami (selanjutnya disebut sebagai “Bank Hijra”) merupakan institusi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang berkomitmen menjadi pionir dalam menghadirkan solusi finansial berbasis syariah di era digital. Melalui integrasi teknologi keuangan terkini, Bank Hijra mentransformasi layanan perbankan digital yang inklusif melalui platform mobile banking.

Hadirnya Bank Hijra melalui platform digital bukan sekadar bentuk modernisasi, melainkan manifestasi dari visi bank untuk menjembatani kesenjangan antara teknologi finansial mutakhir dengan semangat menumbuhkan ekonomi syariah di masyarakat. Dengan memprioritaskan kemudahan nasabah sebagai pusat inovasi, Bank Hijra berupaya memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi syariah.

PT BPRS Hijra Alami secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Implementasi tata kelola ini tidak hanya sekadar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah kerangka kerja terstruktur yang mengintegrasikan tiga pilar utama penilaian yakni;

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola: Memastikan ketersediaan organ perusahaan yang kompeten serta kelengkapan perangkat kebijakan yang memadai untuk mendukung pengambilan keputusan yang akuntabel.
2. Proses Penerapan: Menjalankan mekanisme operasional yang transparan dan disiplin guna memastikan seluruh kebijakan tata kelola terimplementasi dengan efektif di setiap level organisasi.
3. Hasil Implementasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap output tata kelola untuk memastikan keselarasan antara aktivitas operasional dengan standar etika dan kepatuhan yang berlaku.

Melalui implementasi tata kelola yang optimal, Perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional dan bisnis demi meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha secara berkelanjutan. Upaya ini merupakan komitmen nyata PT BPRS Hijra Alami dalam mengoptimalkan nilai perusahaan (corporate value), yang pada akhirnya memberikan manfaat ekonomi dan kepercayaan jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).



# PROFIL PERUSAHAAN

## Alamat

Ruko Pondok Indah Plaza 1  
Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah  
Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8  
Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta  
Selatan 12310

## Nomor Telpun

021 27814716 atau 021 27811136

## Legalitas

Hijra Bank telah memiliki izin usaha sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/16/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Cempaka Al Amin, dengan perubahan nama menjadi Hijra Bank, Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan persetujuan berdasarkan Surat No. SR-84/KR.011/2021 tanggal 20 Mei 2021.



# VISI

Menjadi bank digital yang paling peduli terhadap nasabah dan sekitar.

# MISI

Meningkatkan kualitas hidup nasabah dengan menyediakan solusi keuangan syariah yang praktis, sekaligus merangkul mereka yang kurang beruntung untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil.

# LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Di era digitalisasi dan transformasi industri saat ini, tata kelola yang baik akan membantu bank dalam menjaga integritas dalam pengelolaan data, mengidentifikasi risiko serta mitigasinya, dan beradaptasi dengan regulasi baru terkait teknologi dan keberlanjutan. Bank memiliki visi dan misi yang dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, khususnya nasabah, dengan memberikan layanan perbankan yang didukung oleh teknologi dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung visi dan misi tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh organ, termasuk Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank menjalankan perannya berdasarkan Peraturan Perusahaan, Kode Etik Perusahaan, tugas dan tanggung jawab dan tunduk serta patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Peran ini mencerminkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan mempertimbangkan aspirasi para pemangku kepentingan yang berorientasi jangka panjang, serta mendorong kolaborasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan.

Menjadi pelopor Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang melakukan digitalisasi di Indonesia, Bank terus menempa diri menjadi lebih baik, terus berupaya untuk tumbuh mengikuti perkembangan waktu (modern) dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dan etika bisnis syariah, serta berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat secara profesional sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya.

Dengan upaya tersebut, Bank optimis akan menciptakan kinerja baik dan berkelanjutan melalui penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi tata kelola yang baik menjadi landasan penting agar Bank dapat menjalankan operasional dan bisnis terutama dalam industri perbankan secara prudent dan berkelanjutan, yang akan mengarahkan pada pengelolaan Bank secara profesional.

Lebih lanjut, penerapan tata kelola yang baik di lingkungan Bank juga akan memberikan landasan bagi Bank, untuk menjalankan kegiatan usaha yang menjunjung tinggi perilaku beretika, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi, perang dagang yang ditetapkan oleh negara adidaya dan dampak perubahan iklim.

Sepanjang tahun 2025, komitmen Bank Hijra dalam penerapan GCG tercermin dalam kelengkapan GCG yang dimiliki Bank meliputi Visi dan Misi, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Piagam Internal Audit, Deklarasi Pakta Integritas, Kode Etik dan Kode Perilaku, Kebijakan Tata Kelola, serta kebijakan dan ketentuan lainnya.

## A. Cakupan Tata Kelola

### 01 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh kepada RUPS atas pengelolaan perusahaan/Bank dengan berdasarkan pada ketentuan Anggaran Dasar dan Undang Undang yang berlaku dengan itikad baik serta wajib menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola untuk kepentingan dan tujuan Bank Hijra. Penjelasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai berikut:

a.	<b>Nama</b>	<b>Mochammad Nizar Mustaqim</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Direktur Utama</b>

#### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Mewakili perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian yang berdampak kepada Bank.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh arahan, strategi dan pengelolaan organisasi Bank, memastikan bahwa seluruh aspek strategi, aktivitas, program, layanan, dan tata kelola Bank diimplementasikan berdasarkan kepentingan pemegang saham, nasabah, karyawan, dan masyarakat.
3. Memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan bidang pendukung operasional dan layanan perbankan, teknologi informasi, sistem dan prosedur, aspek hukum, aspek finansial, dan sumber daya manusia.
4. Memberikan arahan strategis dalam bidang pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia Bank dalam mendukung pencapaian sasaran kerja Bank, menjamin dan memelihara kesesuaian terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.

b.	Nama	Tri Israharjo Santoso
	Jabatan	Direktur Kepatuhan

#### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Sebagai pengganti Direktur Utama bila berhalangan dalam mewakili perseroan.
2. Menyusun strategi kepatuhan, termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prinsip kepatuhan.
3. Memastikan seluruh regulasi (kebijakan, sistem, dan prosedur) internal Bank telah sejalan dengan peraturan dan regulasi eksternal yang terkait (Bank Indonesia, OJK dan lembaga/otoritas lainnya).

#### Tugas Dan Tanggung Jawab sebagai Pelaksana Fungsi Direktur Operasional

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan operasional Bank termasuk hal yang terkait dengan kebijakan dan prosedur operasional.
2. Mengarahkan unit kerja operasional untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan transaksi operasional perbankan dengan standar yang memadai.

## TINDAK LANJUT REKOMENDASI

### Hasil Pengawasan Dewan Komisaris

Guna memastikan keberlanjutan bisnis dan penguatan fundamental perusahaan, Direksi diharapkan untuk memperhatikan poin-poin strategis sebagai berikut:

#### Pemeliharaan Stabilitas Keuangan dan Tingkat Kesehatan Bank

Guna memastikan keberlanjutan bisnis dan penguatan fundamental perusahaan, Direksi diharapkan untuk memperhatikan poin-poin strategis sebagai berikut:

**Ekspansi Portofolio Pembiayaan yang Selektif dan Prudensial**

Direksi agar secara berkesinambungan mengoptimalkan penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi yang prospektif dan memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Langkah ekspansi ini wajib dibarengi dengan prinsip kehati-hatian (prudent) serta penguatan kerangka mitigasi risiko yang lebih presisi dan terukur.

**Sinkronisasi dan Adaptabilitas Rencana Bisnis Bank (RBB)**

Direksi perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Bisnis Bank agar tetap relevan dengan dinamika pasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan strategi pertumbuhan yang ditetapkan dapat dieksekusi secara efektif guna mencapai target-target korporasi.

**Penguatan Kepercayaan Nasabah dan Masyarakat (*Stakeholder Trust*)**

Direksi agar senantiasa menjaga serta meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata nasabah maupun masyarakat luas. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam memastikan stabilitas aktivitas penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun keberlanjutan penyaluran pembiayaan.

**02 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah mengimplementasikan fungsi pengawasan serta pemberian arahan strategis kepada Direksi secara berkesinambungan. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan melalui forum rapat gabungan, penyampaian rekomendasi formal atas berbagai isu manajerial, serta evaluasi komprehensif terhadap kinerja Bank Hijra guna memastikan keselarasan dengan target perusahaan.

a.	<b>Nama</b>	<b>Dima Audra Djani</b>
	<b>Jabatan</b>	<b>Komisaris Utama</b>

### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan.
2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
4. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan Rapat Dewan Komisaris, termasuk agenda Rapat.
5. Memastikan bahwa pelaksanaan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai prosedur.
6. Memastikan bahwa rapat Dewan Komisaris melakukan pengambilan keputusan secara efektif berdasarkan informasi yang benar dan lengkap.

b.	Nama	Nuri Wulandari
	Jabatan	Komisaris Independen

### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan.
2. Meminta penjelasan dari Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Bank.
3. Menyampaikan laporan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.
4. Memimpin upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris.
5. Melakukan tanggung jawab lain yang ditugaskan oleh Komisaris utama, dari waktu ke waktu.

## REKOMENDASI

### Kepada Direksi

- Mempertahankan Kinerja Keuangan dan tingkat kesehatan Bank Hijra
- Melakukan upaya-upaya untuk meneruskan pembiayaan kepada sektor-sektor yang masih berpotensi untuk dapat tumbuh dan berkembang namun tetap prudent dan memperhatikan risiko serta melakukan mitigasi risiko yang lebih terukur.

- ☑ Menyesuaikan Rencana Bisnis Bank agar dapat terus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh Direksi.
- ☑ Menjaga kepercayaan dari nasabah maupun dari masyarakat agar aktivitas pembiayaan dan penghimpunan dana tetap berjalan optimal.

### 03 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS.

a.	Nama	Bahrudin Moyensyah
	Jabatan	Ketua DPS

#### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
2. Menilai aspek Syariah terhadap kebijakan/ pedoman/ketentuan dan produk/atau aktivitas yang dikeluarkan Perseroan.
3. Memberikan opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional Perseroan secara keseluruhan dalam laporan publikasi Perseroan.
4. Melakukan pengawasan dan pelaporan sesuai dengan tata cara pelaporan dan pengawasan yang ditentukan regulator
5. Memimpin rapat Dewan Pengawas Syariah.
6. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas Syariah.

b.	Nama	Samsi
	Jabatan	Anggota DPS

#### Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).
3. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya.
4. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Perseroan terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN).

## REKOMENDASI

### Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi

- Sepanjang periode 2025, hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencakup hasil pengawasan terhadap Pengembangan Produk dan Aktivitas Baru BPRS dan Kegiatan BPRS, meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana serta layanan BPRS telah dilaksanakan dengan sangat baik. Hal tersebut sebagaimana tercermin di dalam Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas.

#### LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER I

- 003/BPRS-HA/DPS/VIII/2025

#### LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER II

- 001/BPRS-HA/DPS/II/2026

## 04 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat tata kelola yang amanah, saat ini Dewan Komisaris sedang mempertimbangkan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk memastikan fungsi pengawasan dan kebijakan perusahaan berjalan lebih optimal di masa depan yang akan semakin memperkokoh kepercayaan nasabah.

### B. Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT BPR Syariah Hijra Alami (Bank) dalam pengelolaannya telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Tata Kelola yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:



#### Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.



#### Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua bagian berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran, dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank.



## Tanggung Jawab (Responsibility)

Kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Bank bertindak sebagai good corporate citizen (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.



## Independensi (Independency)

Pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.



## Kewajaran (Fairness)

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

“

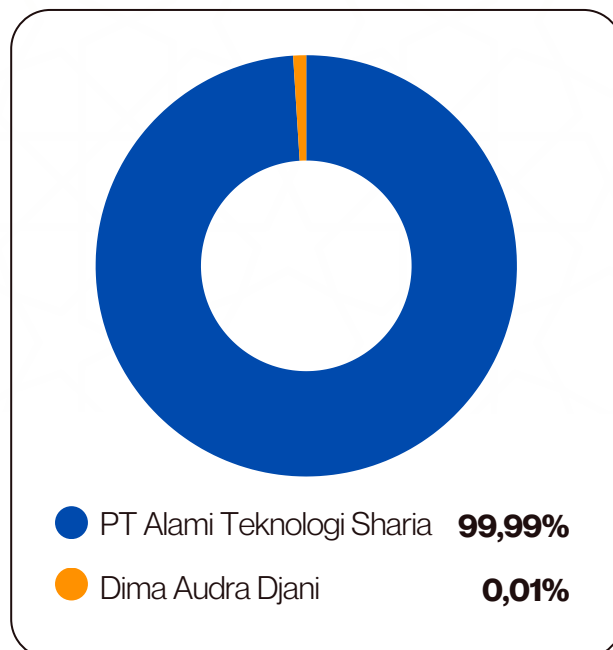
Bank telah melakukan penilaian atas kualitas penerapan GCG Bank secara berkala, yang dilakukan secara mandiri (self-assessment) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penerapan self-assessment ini, Bank juga memperhatikan pengaturan baru terkait dengan penerapan GCG yaitu dengan adanya aspek pemegang saham dan penambahan aspek lainnya dalam pilar penerapan tata kelola Bank yang dijabarkan sebagaimana berikut:

”

## 1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang Saham telah memberikan dukungan terhadap pengembangan Bank antara lain dalam bentuk sinergi bisnis antara lain Bank dengan PT Alami Fintek Sharia dan penguatan permodalan yang telah dilakukan oleh Pemegang Saham kepada Bank.

### Kepemilikan Saham Bank



## **2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi**

Saat ini, struktur Direksi Bank telah terpenuhi dengan komposisi 2 (dua) orang anggota yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Kepatuhan. Fungsi kepatuhan dikelola secara independen oleh Direktur yang membidangnya, dengan didukung oleh kompetensi mendalam serta pengalaman yang relevan dalam memastikan kepatuhan operasional Bank terhadap regulasi yang berlaku. Kapasitas kepemimpinan Direksi tercermin secara nyata melalui performa bisnis yang sehat, antara lain terjaganya rasio pembiayaan bermasalah (NPF) pada tingkat yang rendah, terpenuhinya struktur organisasi yang efektif, serta pengembangan inovasi produk dan layanan yang senantiasa berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan kompeten melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diangkat secara resmi berdasarkan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan mandatnya, Direksi senantiasa bertindak profesional dan menjaga integritas jabatan dengan tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang, maupun tanggung jawab utama sebagai pimpinan Bank.

## **3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris**

Tahun 2025 merupakan periode konsolidasi dan transformasi yang penuh tantangan namun konstruktif bagi PT BPRS Hijra Alami. Memasuki tahun ini, Bank menghadapi tekanan profitabilitas yang signifikan akibat penyesuaian struktural pasca migrasi sistem teknologi informasi dari Mambu ke IBA, meningkatnya beban operasional yang sepenuhnya ditanggung sendiri (tidak lagi dibantu oleh Grup), serta struktur SDM yang masih gemuk — yang secara kumulatif menyebabkan kerugian bulanan rata-rata mencapai sekitar Rp 2 miliar pada awal tahun, dengan BOPO sempat berada di level 229,68% dan ROA -11,57% pada Mei 2025. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Komisaris secara konsisten menjalankan fungsi pengawasannya melalui enam rapat formal sepanjang tahun, dengan fokus pada tindak lanjut temuan Exit Meeting OJK Februari 2025, perbaikan rentabilitas, efisiensi beban tenaga kerja dan biaya teknologi informasi, penguatan permodalan dan KPMM, penajaman tata kelola dan budaya prinsip kehati-hatian sesuai POJK No. 17/POJK.03/2023, penguatan strategi anti-fraud dan audit internal, serta peningkatan kepatuhan APU-PPT.

Manajemen merespons rekomendasi Dewan Komisaris dengan langkah-langkah konkret, antara lain pembentukan task force pemantauan KPMM, benchmark biaya tenaga kerja, evaluasi struktur organisasi, penyempurnaan SOP pembiayaan dan pricing, penjadwalan sinergi rutin dengan Dewan Pengawas Syariah, dan pelaksanaan training APU-PPT bagi seluruh karyawan. Hasil dari seluruh upaya tersebut mulai terlihat menjelang akhir tahun: Bank berhasil menekan kerugian secara signifikan dari proyeksi rugi Rp 20,6 miliar menjadi realisasi rugi Rp 8,3 miliar, BOPO turun drastis dari 229,68% menjadi 120,78%, ROA membaik menjadi -3,16%, KPMM kembali ke level sehat 23,28%, dan sebagian besar indikator utama RBB tercapai di atas 80% dari target. Memasuki tahun 2026, Dewan Komisaris menilai bahwa fondasi yang dibangun pada 2025 — meliputi disiplin tata kelola, efisiensi operasional, penguatan organisasi dengan masuknya Direktur Bisnis baru, dan kesiapan menghadapi dinamika makroekonomi (proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,0–5,2% dengan inflasi terkendali) — telah cukup memadai untuk mengakselerasi pencapaian target dan membawa Bank kembali ke jalur profitabilitas yang berkelanjutan.

#### **4 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Hijra terdiri dari seorang Ketua dan seorang Anggota yang telah memiliki legalitas serta kompetensi resmi dari DSN-MUI dan OJK. Seluruh anggota DPS diangkat melalui mekanisme RUPS untuk mengawasi kepatuhan syariah pada seluruh aspek operasional Bank.

Dalam menjalankan perannya, DPS memastikan setiap inovasi dan produk baru senantiasa selaras dengan prinsip syariat—mulai dari pemberian opini kesesuaian syariah hingga proses peluncuran produk. Untuk menjaga objektivitas, anggota DPS tidak diperbolehkan memiliki rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Bank Hijra menjaga independensi mutlak dengan memastikan tidak adanya hubungan kekeluargaan maupun hubungan keuangan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Integritas ini diterapkan secara ketat guna menjamin proses pengambilan keputusan yang objektif dan profesional di seluruh tingkatan organisasi.

## **5 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite**

Sebagai wujud komitmen dalam memperkuat tata kelola yang amanah, saat ini Dewan Komisaris sedang dalam proses mempersiapkan pembentukan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Langkah ini selain melaksanakan kewajiban dari ketentuan, juga untuk memastikan fungsi pengawasan dan kebijakan perusahaan berjalan lebih optimal di masa depan yang akan semakin memperkuat kepercayaan nasabah.

## **6 Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan BPRS**

Dalam upaya mengimplementasikan prinsip syariah secara konsisten, seluruh kegiatan operasional, aktivitas, dan layanan Bank—termasuk tahapan pengembangan produk baru—senantiasa merujuk pada regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sebagai bentuk mitigasi risiko syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan aktif guna memastikan kepatuhan melalui mekanisme uji petik (sampling) yang dilaksanakan secara berkala.

Setiap inisiatif pengembangan produk baru wajib melalui proses pembahasan mendalam dan dilengkapi dengan opini resmi dari DPS. Seluruh rangkaian proses tersebut didokumentasikan secara akuntabel dalam risalah rapat rutin yang mencakup rekam jejak diskusi teknis serta opini kesesuaian syariah. Dokumen ini menjadi prasyarat mutlak sebelum produk diajukan kepada regulator maupun dipasarkan kepada nasabah.

Guna mengoptimalkan fungsi pengawasan syariah, Bank didukung oleh Sumber Daya Insani (SDI) yang memiliki kompetensi profesional dan pemahaman mendalam di bidang syariah. Dalam struktur organisasi, Bank telah menempatkan seorang Liaison Officer di bawah koordinasi Unit Kerja Kepatuhan.

Posisi strategis ini berperan penting dalam memfasilitasi kebutuhan administratif serta operasional DPS. Kehadiran fungsi ini memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap seluruh aktivitas Bank dapat berjalan secara efektif, sistematis, dan berkesinambungan.

## 7 Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah menetapkan kebijakan yang komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengelola potensi benturan kepentingan. Landasan kebijakan tersebut diintegrasikan secara sistematis ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Benturan Kepentingan, Kode Etik Perusahaan, serta pedoman implementasi Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) yang berlaku di seluruh lini internal Bank.

Sepanjang periode pelaporan ini, tidak ditemukan adanya insiden benturan kepentingan yang merugikan aspek finansial maupun operasional Bank. Seluruh aktivitas bisnis dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, sehingga dipastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap regulasi otoritas, prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), maupun prinsip-prinsip syariah.

## 8 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

Bank berkomitmen penuh dalam menerapkan prinsip tata kelola yang baik melalui penguatan struktur dan infrastruktur organisasi secara berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan dengan senantiasa melakukan pembaharuan dan penyempurnaan kebijakan, prosedur, serta petunjuk teknis operasional guna memastikan seluruh aktivitas bank selaras dengan standar regulasi yang ditetapkan oleh otoritas terkait.

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, Bank telah menetapkan struktur organisasi fungsional yang terdiri dari satuan kerja strategis sebagai berikut:

### Fungsi Audit Internal dan Eksternal

Satuan Kerja Audit Internal berperan aktif dalam mengawasi konsistensi proses bisnis di setiap unit kerja. Fungsi ini memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional telah dijalankan sesuai dengan regulasi dan standar prosedur yang berlaku. Saat ini, posisi Pejabat Eksekutif telah terisi oleh personel yang kompeten dan menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan.

Dalam menjaga transparansi laporan keuangan, Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Dra. Suhartati & Rekan sebagai auditor eksternal. KAP tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki keahlian mendalam di bidang perbankan syariah. Penunjukan ini dilakukan melalui rekomendasi Dewan Komisaris dan telah mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memastikan audit dilakukan secara independen dan profesional sesuai dengan kode etik auditor.

### Satuan Kerja Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan memegang peranan vital sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh operasional bank selaras dengan regulasi otoritas serta kebijakan internal melalui dukungan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman komprehensif mengenai perbankan syariah dan implementasi program APU, PPT, serta PPPSPM.

Satuan kerja ini menaungi berbagai unit strategis, termasuk unit kerja APU PPT, Sharia Compliance, serta Legal & Appraisal, di mana seluruh personelnnya telah dibekali pelatihan dan sertifikasi relevan guna menjamin pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal dan profesional. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko kepatuhan yang kuat dan pengembangan budaya patuh di seluruh jenjang organisasi, fungsi ini berperan sebagai penasihat strategis yang efektif dalam memitigasi risiko hukum serta menjaga reputasi dan kepercayaan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

## 9 Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk sistem pengendalian internal

Bank memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dipimpin oleh Pejabat Eksekutif berkompeten, berpengalaman, dan tersertifikasi. SKMR terlibat aktif dalam operasional Bank, termasuk dalam proses penyaluran pembiayaan. Didukung oleh staf ahli, Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko juga bertanggung jawab atas fungsi Anti-Fraud. Fokus utama kerja satuan ini meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dituangkan secara sistematis dalam kebijakan, prosedur, serta penanganan insiden fraud (internal maupun eksternal).

Pertumbuhan Portofolio yang Ekspansif Tahun 2025 merupakan tahun akselerasi bagi Bank. Sejalan dengan strategi bisnis untuk terus bertumbuh dan mendukung sektor riil, Bank berhasil mencatatkan pertumbuhan portofolio pembiayaan yang sangat signifikan. Total pembiayaan yang disalurkan melonjak lebih dari dua kali lipat, tumbuh sebesar 109%, dari Rp.111 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp.232 miliar pada akhir tahun 2025. Pencapaian ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat dan keberhasilan strategi penetrasi pasar yang dijalankan oleh Perusahaan sepanjang tahun berjalan.

Dinamika Kualitas Pembiayaan (NPF) Seiring dengan ekspansi pembiayaan yang masif dan agresif tersebut, Bank menghadapi dinamika yang wajar pada kualitas aset. Nilai pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) tercatat mengalami peningkatan dari Rp.1,05 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp.6,17 miliar pada tahun 2025. Secara rasio, NPF Bank bergerak dari level yang sangat rendah yakni 0,94% menjadi 2,66%.

Peningkatan rasio NPF ini merupakan dampak logis dari volume penyaluran pembiayaan baru yang melonjak drastis, serta dinamika bisnis nasabah di beberapa sektor ekonomi. Meskipun demikian, Manajemen menegaskan bahwa rasio NPF sebesar 2,66% masih berada pada level yang sehat. Peningkatan ini dinilai masih sepadan dengan tingkat imbal hasil (*yield*) dan perluasan pangsa pasar (*market share*) yang berhasil diraih oleh Bank.

### Tahun 2024

Product/Col	Total	%
1	110.920.364.223	99,06%
2	2.829.916	0,00%
3	748.001.592	0,67%
4	-	0,00%
5	303.980.935	0,27%
<b>Total</b>	<b>111.975.176.666</b>	
<b>NPF</b>	<b>1.051.982.527</b>	<b>0,94%</b>

### Tahun 2025

Product/Col	Total	%
1	226.050.438.649	97,34%
2	-	0,00%
3	3.246.519.048	1,40%
4	-	0,00%
5	2.928.892.536	1,26%
<b>Total</b>	<b>232.225.850.233</b>	
<b>NPF</b>	<b>6.175.411.584</b>	<b>2,66%</b>

Strategi Pengendalian dan Mitigasi Risiko Bank tetap memegang teguh prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam setiap aktivitas bisnisnya. Untuk memastikan rasio NPF tetap terjaga pada level yang sehat dan meminimalkan risiko pemburukan kualitas aset di masa mendatang, Manajemen telah merumuskan dan mengimplementasikan beberapa strategi mitigasi utama, antara lain:

- Penguatan *Underwriting* dan *Credit Scoring*: Meningkatkan standar analisis kelayakan nasabah untuk penyaluran pembiayaan baru, dengan memanfaatkan data analitik yang lebih komprehensif.
- Intensifikasi *Monitoring Portofolio*: Melakukan pemantauan secara ketat (*EWS - Early Warning System*) terhadap pembiayaan yang menunjukkan potensi penurunan kolektibilitas agar dapat ditangani sejak dini.
- Restrukturisasi Proaktif: Memberikan skema restrukturisasi pembiayaan yang tepat sasaran bagi nasabah-nasabah yang kooperatif dan memiliki prospek usaha yang masih baik namun mengalami kendala arus kas sementara.
- Optimalisasi Penagihan (*Collection*): Mengintensifkan upaya penagihan secara persuasif dan terukur pada portofolio yang telah masuk ke dalam kategori Non-Performing.

Kedepannya, Bank optimis bahwa portofolio pembiayaan yang ada saat ini akan terus memberikan kontribusi profitabilitas yang maksimal. Bank berkomitmen untuk terus menyeimbangkan antara strategi pertumbuhan bisnis yang agresif dengan pengelolaan risiko yang terukur.

## 10 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)

Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan dan prosedur terkait batas maksimum penyaluran dana. Bank senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan mengenai BMPD. Bank juga telah menerbitkan ketentuan internal mengenai Limit Penyaluran Dana dimana ketentuan ini mengatur BMPD Kepada Pihak Terkait Bank, Pihak Tidak Terkait dan Pihak Tidak Terkait Kelompok Peminjam. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan batasan besaran Penyaluran Dana kepada Nasabah Pembiayaan sesuai dengan kondisi terkini Bank serta adanya aturan yang dapat dijadikan pedoman bersama, supaya dalam penyaluran pembiayaan serta pemantauan atas pembiayaan yang berjalan agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Dalam hal terdapat pelampauan BMPD, Bank akan melakukan langkah-langkah berupa rencana tindak dan penyelesaian terhadap pelampauan yang terjadi.

## 11 Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Bank telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank melaporkannya secara tepat waktu termasuk laporan keuangan dan laporan publikasi. Sebagai bagian dari pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, Bank telah menyusun Standar Operasional Prosedur untuk implementasi POJK 15 Tahun 2024 sedangkan pembentukan task force telah dibentuk 6 (enam) bulan sejak POJK tersebut diundangkan.

Terkait dengan penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen, Bank telah memiliki unit kerja yang bertugas untuk menangani hal ini. Bank juga menjaga penggunaan data pribadi nasabah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan atas data tersebut.

## 12. Rencana Bisnis Bank (RBB)

Bank telah membuat dan melaporkan Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Penyampaian RBB memperhatikan/mempertimbangkan berbagai aspek termasuk faktor intern dan ekstern yang akan mempengaruhi keberlangsungan usaha Bank, prinsip kehati-hatian, asas perbankan yang sehat dan prinsip syariah.

Dalam hal Bank diminta untuk melakukan perubahan RBB sesuai dengan arahan OJK dan jika Bank memerlukan perubahan RBB dari sisi Bank, maka Bank akan melakukan perubahan RBB tersebut sesuai dengan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan serta adanya kebutuhan Bank dalam perubahan RBB tersebut.

## 13. Hasil Penilaian

Hasil self-assessment Tata Kelola Bank pada Semester I dan II tahun 2025, sebagai berikut:

### *Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola*

Semester I tahun 2025	Semester II tahun 2025
Peringkat Komposit (PK): 1	Peringkat Komposit (PK): 2

### Penjelasan

Menurut tabel perhitungan di atas maka total penilaian sendiri Bank Hijra adalah sebesar 2 dengan nilai komposit sebesar 2.

Bank Hijra telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum dengan hasil baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPR Syariah.

## C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank Hijra senantiasa menjaga independensi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dengan tidak memiliki saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada Bank Hijra. Selain itu, tidak terdapat kepemilikan saham oleh Direksi yang melampaui persentase modal disetor Bank Hijra.

Penjelasan rinci mengenai struktur kepemilikan saham atau konfirmasi nihilnya kepemilikan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

### • Mochamad Nizar Mustaqim

No	Kepemilikan Saham	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	BPRS Yang Bersangkutan	-	-
2	Perusahaan Lain	-	-

### • Tri Israharjo Santoso

No	Kepemilikan Saham	Nominal (Rp)	Prosentase Kepemilikan (%)
1	BPRS Yang Bersangkutan	-	-
2	Perusahaan Lain	-	-

## D. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Mayoritas Direksi Bank Hijra tidak memiliki hubungan afiliasi atau keterkaitan atau ketergantungan dalam hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga, antar pejabat, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali atau pemegang saham utama, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk bertindak independen. Berikut dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

### Hubungan Keuangan Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mochamad Nizar Mustaqim	-	-	-
2	Tri Israharjo Santoso	-	-	-

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mochamad Nizar Mustaqim	-	-	-
2	Tri Israharjo Santoso	-	-	-

## E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPRS yang Bersangkutan dan Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kepemilikan saham yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada Bank Hijra, maupun bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam atau luar negeri.

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
		BPRS Yang Bersangkutan		Perusahaan Lain	
		Nominal (Rp)	Prosentase	Nama Perusahaan	Prosentase
1	Dima Audra Djani	Rp.1.000.000	0,007%	1. PT Alami Teknologi Sharia 2. Alami Technologies PTE Ltd 3. PT Hijra Alami Teknologi 4. PT Alif Lamim Investama	99,993% 15,40% 92,00% 57,00%
2	Nuri Wulandari	-	-	1. BPR Harta Tanamas 2. BPR Adil Jaya Artha 3. BPR Catur Jaya Artha 4. BPR Universal	25,25% 10,00% 9,00% 1,77%

## F. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham BPRS yang Bersangkutan

Sebagai wujud nyata implementasi prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Hijra secara konsisten mengungkapkan informasi terkait hubungan afiliasi. Hal ini mencakup keterkaitan maupun ketergantungan dalam aspek keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, hingga hubungan kekeluargaan di antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, serta Pemegang Saham Pengendali atau Utama.

Pengungkapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dan kemampuan para pihak tersebut dalam bertindak secara independen.

Adapun rincian hubungan afiliasi tersebut disajikan secara komprehensif pada tabel berikut:

### Hubungan Keuangan Anggota Komisaris

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Dima Audra Djani	-	-	Ya
2	Nuri Wulandari	-	-	-

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mochamad Nizar Mustaqim	-	-	-
2	Tri Israharjo Santoso	-	-	-

## G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris pada Bank Perkreditan Rakyat, BPRS Lain, dan/atau Lembaga atau Perusahaan Lain

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah perihal rangkap jabatan bagi struktur Dewan Komisaris di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) maupun lembaga bukan keuangan. Berikut rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank Hijra:

### Hubungan Keuangan Anggota Komisaris

No	Nama Anggota Komisaris	Nama BPRS Lain/ BPR/Lembaga/Perusahaan***)	Jabatan
1	Dima Audra Djani	Alami Teknologi Sharia	Direktur
		Alami Technologies PTE LTD	Direktur
		Alami Fintek Sharia	Komisaris
		Hijra Alami Teknologi	Direktur
2	Nuri Wulandari	BPR Harta Tanamas	Komisaris

### Hubungan Keuangan Anggota Komisaris

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1	Dima Audra Djani	-	-	Ya
2	Nuri Wulandari	-	-	-

### Hubungan Keluarga Anggota Direksi

No	Nama Direksi	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Mochamad Nizar Mustaqim	-	-	-
2	Tri Israharjo Santoso	-	-	-

## H. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lain

Dalam rangka menjaga profesionalisme dan efektivitas fungsi pengawasan syariah, PT BPRS Hijra Alami memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi. Seluruh anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan yang dapat mengganggu objektivitas maupun waktu kerja dalam menjalankan amanah pengawasan.

Implementasi kebijakan rangkap jabatan bagi DPS telah sepenuhnya selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS., di mana anggota DPS Bank dipastikan:

#### KESESUAIAN JUMLAH JABATAN LKS

Tidak menjabat sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) BPRS lain dan tidak melebihi batas maksimal 2 (dua) lembaga jasa keuangan syariah lainnya.



### KEPATUHAN STRUKTUR DEWAN

Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh OJK, dengan tetap memperhatikan terpenuhinya kriteria batas jabatan pada poin di atas.



### PEMISAHAN FUNGSI EKSEKUTIF

Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.



### MITIGASI BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak menduduki posisi pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan, sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.



Melalui kepatuhan terhadap batasan rangkap jabatan ini, DPS dapat mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran secara optimal dalam mengawal penerapan prinsip syariah pada setiap produk dan aktivitas bisnis Hijra Bank, sehingga kepercayaan nasabah dan seluruh pemangku kepentingan tetap terjaga dengan baik.

Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam tabel sebagai berikut:

No	Nama Direksi	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain***)	Jabatan
1	Bahrudin Moyensyah	-	-
2	Samsi	-	-

## I. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS

Bank telah menyusun struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Direksi dengan memperhatikan tugas, wewenang, kinerja, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, DPS dan Direksi. Bank juga memperhatikan remunerasi yang berlaku di industri sejenis (peers group) dan kemampuan Bank.

Selama tahun 2025, jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah	Jumlah Orang	Jumlah	Jumlah Orang	Jumlah
<b>A Remunerasi</b>							
1.	Gaji Pokok	3 orang (Januari - September)  2 orang (Oktober - Desember)	1.443.400.000	2	143.000.000	2	130.000.000
2.	Tunjangan	3	428.428.716	2	-	2	-
3.	Tantiem	-	-	-	-	-	-
4.	Bonus	-	-	-	-	-	-
5.	Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
6.	Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
<b>Total Remunerasi</b>		-	-	-	-	-	-
<b>B Fasilitas Lain</b>							
1.	Perumahan	-	-	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-	-	-
3.	Kesehatan	-	110.380.045	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lain-Lainnya*)	-	-	-	-	-	-
<b>Total Fasilitas Lain</b>		-	110.380.045	-	-	-	-
<b>C Total Remunerasi dan Fasilitas Lain</b>		-	<b>1.624.852.381</b>	-	<b>143.000.000</b>	-	<b>130.000.000</b>

## J. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Di bawah ini pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam skala perbandingan berikut:

RASIO GAJI	DESKRIPSI	RASIO
	Rasio gaji anggota Direksi yang terendah terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,86
	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,00
	Rasio gaji anggota DPS yang terendah terhadap gaji anggota DPS yang tertinggi	0,83
	Rasio gaji pegawai yang terendah terhadap gaji pegawai yang tertinggi	0,21
	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,18
	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,52

## K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama periode tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali rapat dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Berikut di bawah ini rekapitulasi rapat Dewan Komisaris.

### Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2025

No.	Tanggal Rapat	Periode	Agenda Rapat	Anggota Hadir
1	11 Februari 2025	Triwulan I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja 2024</li> <li>2. Penguatan Budaya &amp; Prinsip Kehati-hatian</li> <li>3. Evaluasi Penghentian Sistem TI Mambu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dima Audra Djani</li> <li>2. Nuri Wulandari</li> </ol>
2	17 Februari 2025	Triwulan I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Hasil Audit OJK 2025 &amp; Exit Meeting</li> <li>2. Perbaikan Kinerja &amp; Rentabilitas</li> <li>3. Tata Kelola: Posisi Komisaris Independen &amp; Penyempurnaan SOP</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dima Audra Djani</li> <li>2. Nuri Wulandari</li> </ol>
3	18 Juni 2025	Triwulan II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja YoY Mei 2025</li> <li>2. Evaluasi Strategi Bisnis &amp; Perubahan Struktur Organisasi</li> <li>3. Pengawasan Strategi Bisnis Menuju Semester II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dima Audra Djani,</li> <li>2. Nuri Wulandari</li> </ol>
4	9 Juli 2025	Triwulan III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Kinerja YoY Mei 2025</li> <li>2. Progress Audit Internal Semester I (Audit Pembiayaan &amp; Strategi Anti-Fraud)</li> <li>3. Pengawasan Penerapan APU-PPT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dima Audra Djani,</li> <li>2. Nuri Wulandari</li> </ol>

No.	Tanggal Rapat	Periode	Agenda Rapat	Anggota Hadir
5	14 Oktober 2025	Triwulan III	1. Strategi Bisnis & Pengawasan KPMM dan Permodalan 2. Sinergi Dewan Pengawas Syariah (DPS) 3. Kinerja Menuju Akhir Tahun & Persiapan RBB 2026	1. Dima Audra Djani, 2. Nuri Wulandari
6	19 Desember 2025	Triwulan IV	1. Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2025 2. Penyusunan RBB 2026 & Proyeksi Makroekonomi 3. Strategi Tim Menuju 2026	1. Dima Audra 2. Djani, Nuri Wulandari

### Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Dima Audra Djani	6	6	100%
Nuri Wulandari	6	6	100%

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 (enam) rapat formal yang seluruhnya didokumentasikan dalam Minuta Rapat (MoM) resmi, dengan tingkat kehadiran 100% dari kedua anggota Dewan Komisaris. Rapat-rapat tersebut mencakup evaluasi triwulanan, tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK, evaluasi audit internal semesteran, serta penyusunan Rencana Bisnis Bank 2026, sebagaimana dirinci dalam tabel di atas. Selain rapat formal di atas, fungsi pengawasan Dewan Komisaris juga dilaksanakan melalui dua komunikasi tertulis (surat/email) resmi dari Dewan Komisaris kepada Direksi, yaitu: (i) Surat tanggal 20 Mei 2025 perihal Permintaan Benchmark Remunerasi serta Evaluasi Kinerja April 2025; dan (ii) Surat tanggal 10 Juni 2025 perihal Evaluasi Mei YoY 2024/2025 dan Usulan Strategi Pemulihan Kesehatan Keuangan BPRS yang memuat usulan strategis berupa injeksi modal bertahap Rp 5 miliar per kuartal serta target penurunan BOPO 20% per kuartal. Kedua komunikasi tertulis ini menjadi bagian integral dari pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tindak lanjutnya tercermin dalam pembahasan rapat-rapat formal berikutnya.

Di samping itu, sepanjang tahun 2025 Dewan Komisaris juga berpartisipasi dalam sejumlah rapat tematik dan rapat koordinasi internal lainnya yang tidak didokumentasikan dalam MoM formal Dewan Komisaris, antara lain rapat evaluasi kinerja BPRS, pendekatan calon Komisaris Independen, rapat pelaporan hasil audit semesteran, pembahasan Tingkat Kesehatan Bank dan APU-PPT Training, rapat peningkatan permodalan, evaluasi penerapan audit syariah, rapat koordinasi dengan DPS dalam rangka penyusunan RBB, dan rapat evaluasi prospek tahun 2025. Rapat-rapat tematik tersebut melengkapi mekanisme pengawasan formal dan menunjukkan intensitas keterlibatan Dewan Komisaris dalam pengawasan operasional Bank sepanjang tahun.

## L. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

Sesuai ketentuan POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah, DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dihadiri oleh seluruh anggota DPS dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan bersama Direksi maupun Dewan Komisaris yang dihadiri mayoritas oleh Direksi dan Komisaris.

### RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No	Tanggal	Agenda Rapat	Jumlah Peserta
1	30/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Pengawasan DPS Periode Semester II Tahun 2024</li> <li>Update POJK Terbaru Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS</li> <li>Rencana Agenda Kerja Dewan Pengawas Syariah Hijra Bank 2025</li> </ul>	7
2	12/03/2025	Acquisition Program - THR Hijra 2025	5
3	26/06/2025	Referral Exclusive Program Hijra Bank	11
4	17/07/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama PT BPRS Hijra Alami &amp; Finest Future</li> <li>Rencana Program Sosial Sedekah Bersama Hijra Bank, Membawa Harapan Tanpa Batas</li> </ul>	8
5	28/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama PT BPRS Hijra Alami dengan Fairbanc</li> <li>Layanan payroll PT BPRS Hijra Alami</li> <li>Kerjasama pembiayaan PT Bank Ina Persada dengan PT BPRS Hijra Alami</li> <li>Program deposito pensiunan</li> <li>Laporan realisasi penyaluran dana kebajikan bulan juli 2025</li> </ul>	18
6	28/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skema Kerjasama QRIS Soundbox Netzme X Hijra Bank</li> <li>Potensi Pembiayaan Hijra Bank dan Netzme</li> </ul>	12
7	13/11/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Deposito Online Spesial Akhir Tahun</li> <li>Program Deposito Extra Beasiswa Hijra Bank Dengan Kampus</li> <li>Penyaluran Dana Sosial Hijra Bank</li> </ul>	10

### RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH - DEWAN KOMISARIS

No	Tanggal	Agenda Rapat	Jumlah Peserta
1	16/10/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refreshment terkait POJK 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS</li> <li>Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester I Tahun 2025</li> <li>Update Pelaksanaan Pra Ijtima Dan Ijtima Tsanawi DSN-MUI Tahun 2025</li> </ul>	7
2	03/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Refreshment terkait POJK 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Syariah Bagi BPRS</li> <li>Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Periode Semester I Tahun 2025</li> <li>Update Pelaksanaan Pra Ijtima Dan Ijtima Tsanawi DSN-MUI Tahun 2025</li> </ul>	15
3	03/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tinjauan Pencapaian Performa 2025</li> <li>Rencana Bisnis Bank 2026</li> </ul>	7

## RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH - DIREKSI

No	Tanggal	Agenda Rapat	Jumlah Peserta
1	12/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Penyaluran Dana Kebajikan Hijra Bank 2025</li> </ul>	6
2	11/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Realisasi Penyaluran Dana Sosial</li> <li>Rencana Pelaksanaan Uji Petik Dan Pelaporan Pengawasan DPS Semester I 2025</li> <li>Penyampaian Hasil Audit Syariah 2024 Dan Rencana Audit Syariah Tahun 2025</li> <li>Management Update</li> </ul>	9
3	12/03/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana Penyaluran Dana Kebajikan Hijra Bank 2025</li> </ul>	6
4	26/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Realisasi Penyaluran Dana Sosial</li> <li>Rencana Pelaksanaan Uji Petik Dan Pelaporan Pengawasan DPS Semester I 2025</li> <li>Penyampaian Hasil Audit Syariah 2024 Dan Rencana Audit Syariah Tahun 2025</li> <li>Management Update</li> </ul>	9
5	28/08/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan realisasi penyaluran dana kebajikan bulan juli 2025</li> </ul>	6

### Total Kehadiran Rapat DPS, DPS dengan Dewan Komisaris dan DPS dengan Direksi

Rapat DPS	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Bahrudin Moyensyah	15	15	100%
Samsi	15	15	100%

## M. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Selama tahun 2025, Bank Hijra tidak memiliki penyimpangan intern/kecurangan (internal fraud) yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap maupun Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercermin pada tabel di bawah ini:

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)*	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh:							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum -nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum- nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaian- nya**)	-	-	-	-	-	-	-	-

## N. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

Selama tahun 2025, Bank Hijra tidak memiliki permasalahan hukum baik terkait Dewan Komisaris, Direksi maupun Perusahaan. Berikut tabel permasalahan hukum tersebut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	-	-
Total	-	-

## O. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2025, terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun hal ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan dan dibayar kembali dari pendapatan yang diperoleh dari Bank berupa gaji serta hal ini dikecualikan sebagai Pembiayaan kepada Pihak Terkait Bank.

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.	Mochamad Nizar Mustaqim	Direktur Utama	-	-	-	-	-
2.	Tri Israharjo Santoso	Direktur Kepatuhan	Dima Audra Djani	Komisaris Utama	Pembiayaan	153.973.349,42	Pembiayaan Fasilitas Transportasi

## P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Sepanjang tahun buku 2025, Bank Hijra telah merealisasikan 6 (enam) program penyaluran dana untuk kegiatan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Sejalan dengan kebijakan kepatuhan, Bank Hijra menegaskan tidak terdapat pengalokasian dana untuk kegiatan yang bersifat politik.

Penggunaan dan sumber penyaluran dana untuk kegiatan sosial telah sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah.

## Pesantren Al Misbah

Pondok Pesantren Al Misbah yang berlokasi di Jl. Angrek rt 004/002 Kp. Cisuuk Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor 16120, telah berdiri sejak Juli 2014. Selama lebih dari 10 tahun, pesantren ini telah berkontribusi signifikan dalam pendidikan agama dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kp. Cisuuk Desa Cibeuteung Udik dan sekitarnya.

### Rincian Penyaluran

Tujuan Penyaluran:

Mendukung pemberdayaan, kesejahteraan, serta kegiatan pendidikan dan pengasuhan bagi anak-anak yatim dan dhuafa.

Nominal Bantuan:  
Rp5.000.000.

Waktu Pelaksanaan:  
Kamis, 31 Juli 2025.



## Baitulmaal Muamalat (BMM)

Baitulmaal Muamalat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang didirikan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Lembaga ini berfokus pada pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) secara profesional dan amanah.

BMM dipercaya sebagai salah satu kanal penyaluran dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan (TBDSP) oleh Bank Hijra. Hal ini sesuai dengan amanat Fatwa DSN-MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018.

### Rincian Penyaluran

Tujuan Penyaluran:

Mendukung kegiatan pendidikan dan pengasuhan anak-anak yatim serta dhuafa sebagai implementasi nilai kepedulian sosial.

Nominal Bantuan:  
Rp5.000.000.

Waktu Pelaksanaan:  
Disetujui pada 26 September 2025.



## Yayasan Kita Bisa

Yayasan Kita Bisa merupakan lembaga filantropi yang mengelola dana sosial dan kemanusiaan melalui platform digital crowdfunding. Kitabisa.com. Berdiri sejak 2013, situs dan aplikasi Kitabisa telah menjadi jembatan kebaikan dan wadah gotong royong masyarakat Indonesia.

Pada 2024, Yayasan Kitabisa menyalurkan Rp830 miliar donasi dari 8 juta donatur dan 400+ mitra.

Dampaknya mencakup 59.000+ pohon ditanam, 3.600 ton sampah dikelola, bantuan untuk akses air bersih, layanan medis, dan pendidikan, serta beragam program lainnya.



## Rincian Penyaluran Dana

Tujuan Penyaluran:

Difokuskan untuk mendukung kegiatan pendidikan serta renovasi atau pembangunan infrastruktur pondok pesantren dan asrama santri.

Nominal Bantuan:  
Rp5.000.000.

Waktu Pelaksanaan:  
Disetujui pada 16 Oktober 2025..

## Yayasan Salam Setara Amanah Nusantara

Salam Setara adalah yayasan amal umum yang ada untuk menciptakan standar baru dalam manajemen dana amal dengan menggabungkan nilai-nilai amaliah Islam yang universal dan teknologi. Didirikan pada inisiatif Kitabisa dan beberapa tokoh, Salam Setara memiliki status sebagai entitas independen yang merupakan bagian dari ekosistem digital Kitabisa yang baik. Sebagai bagian dari ekosistem Kitabisa yang baik, Salam Setara memainkan peran dalam memaksimalkan dampak sosial dana yang dikelola.



## Rincian Penyaluran Dana

Tujuan Penyaluran:

Distribusi bantuan pangan berupa 160 porsi makanan box dan stiker doa untuk pengemudi ojek online serta jamaah masjid.

Nominal Bantuan:

Rp5.000.000.

Waktu Pelaksanaan:

Kamis, 4 Desember 2025

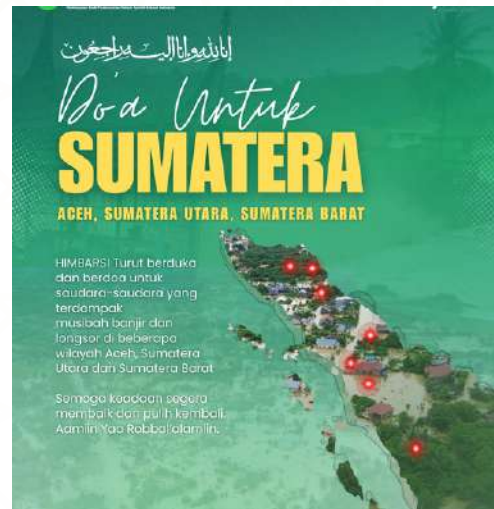
Lokasi:

Masjid Nurul Hidayah Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.

## HimbarSi

HIMBARSI atau Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia, adalah organisasi yang mewadahi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di seluruh Indonesia.

Sebagai bentuk solidaritas dan tanggung jawab sosial terhadap sesama, HimbarSi melakukan penggalangan dana guna membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatera. Hijra Bank sebagai BPRS yang menjadi bagian dari asosiasi tersebut ikut serta menyalurkan dana kebajikan yang dikoordinasi oleh HimbarSi agar bantuan dapat tersampaikan secara tepat sasaran



## Rincian Penyaluran Dana

Tujuan Penyaluran:

Donasi peduli bencana alam (banjir dan tanah longsor) yang melanda wilayah Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar) pada November 2025.

Nominal Bantuan:

Rp2.000.000.

Waktu Pelaksanaan:

Disetujui pada 1 Desember 2025.

## Yayasan Baitul Wakaf

Baitul Wakaf merupakan lembaga yang konsern dalam menghimpun dan mengelola wakaf (Nazhir) produktif yang dibentuk oleh LAZNAS Baitul Mal Hidayatullah (BMH). yang telah bekerjasama dengan hijra dalam penghimpunan dana sosial.

Dana kabjikan Bank Hijra disalurkan melalui Baitul Wakaf/BMH untuk bencana yang melanda wilayah Sumatera pada bulan November 2025 yang menyebabkan dampak yang cukup signifikan yaitu bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.



### Rincian Penyaluran Dana

Tujuan:

Penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana banjir di wilayah Sumatera.

Nominal:

Rp5.000.000.

Waktu Pelaksanaan:

2 Desember 2025

### Q. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Pada tahun 2025, tidak terdapat adanya sanksi administratif yang material dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya kepada Bank, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Bank.



# Dima Audra Djani

## KOMISARIS UTAMA

### RIWAYAT PENDIDIKAN

---

#### **INSEAD**

Master in Business Administration  
2018

#### **RMIT UNIVERSITY**

Bachelor of Business Management  
2008

### RIWAYAT PEKERJAAAN

---

#### **PT ALAMI TEKNOLOGI SHARIA**

Direktur  
2017 - Sekarang

#### **PT ALAMI FINTEK SHARIA**

Direktur Utama  
2018 - 2021

#### **SOCIETE GENERALE**

Vice President  
2015 - 2018

#### **CITIBANK**

Manager  
2009 - 2015

### SERTIFIKASI

---

- SERTIFIKASI KOMPETENSI BPRS-CERTIF (2023).
- SERTIFIKASI FINTECH P2P LENDING DASAR, ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA (2019).
- SERTIFIKASI BSMR, LSPP (2013).
- SERTIFIKASI RISK MANAGEMENT, CITIBANK (2012-2013).

### RANGKAP JABATAN

---

#### **PT ALAMI TEKNOLOGI SHARIA**

Direktur  
2017 - Sekarang

#### **ALAMI TECHNOLOGIES PTE LTD**

Direktur Utama  
2017 - Sekarang

#### **PT ALAMI FINTEK SHARIA**

Komisaris  
2021 - Sekarang

#### **PT BPRS HIJRA ALAMI**

Komisaris  
2021 - Sekarang

### PERIODE JABATAN

---

2024-2029.

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

---

AKTA RUPS NOMOR 55 TANGGAL 17 APRIL  
TAHUN 2024.

### HUBUNGAN AFILIASI

---

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah namun beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan Pengendali.



# Nuri Wulandari

## KOMISARIS INDEPENDEN

### RIWAYAT PENDIDIKAN

---

**UNIVERSITAS INDOENSIA**

Doktor Ilmu Manajemen Fakultas  
Ekonomi  
2014

**UNIVERSITY OF BIRMINGHAM**

Master of Science  
2006

**UNIVERSITAS INDOENSIA**

Sarjana Ekonomi  
2003

### RIWAYAT PEKERJAAN

---

**PT BPR HARTA TANAMAS**

Komisaris  
2008 - Sekarang

**INDONESIA BANKING SCHOOL**

Dosen Tetap Lektor Kepala  
2015 - Sekarang

**INDONESIA BANKING SCHOOL**

Wakil Ketua III  
2020-2022

**INDONESIA BANKING SCHOOL**

Kepala Program Studi  
2019-2020

**INDONESIA BANKING SCHOOL**

Deputi Direktur P3M  
2016-2017

### SERTIFIKASI

---

- PELATIHAN & SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO LEVEL 1, LSPP (2022).
- PELATIHAN & SERTIFIKASI GENERAL BANKING LEVEL 1, LSPP (2022).
- PELATIHAN & SERTIFIKASI KOMISARIS BPR, PERBARINDO & CERTIF (2021).
- PELATIHAN & SERTIFIKASI KOMISARIS BPR SYARIAH, ASBISINDO & CERTIF (2021).
- PELATIHAN & SERTIFIKASI KOMISARIS BPR, PERBARINDO & CERTIF (2016).

### RANGKAP JABATAN

---

**PT BPR HARTA TANAMAS.**

Komisaris

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

---

AKTA RUPS NOMOR 55 TANGGAL 17 APRIL  
TAHUN 2024.

### PERIODE JABATAN

---

2024-2029.

### PERSETUJUAN OJK

---

TAHUN 2021.

### HUBUNGAN AFILIASI

---

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.



# Bahruddin Moeyansyah

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IPWI

Pascasarjana (S2)  
1999

#### UIN SYARIF HIDAYATULLAH

Sarjana (S1)  
1988

### RIWAYAT PEKERJAAN

#### PONDOK PESANTREN DARUNNAJAH

Pengajar  
1984-2020

### SERTIFIKASI

- SERTIFIKAT WEBINAR  
WORKSHOP PRA-IJTIMA' DAN  
IJTIMA' SANAWI TAHUN 2021  
SAMPAI DENGAN 2024

### PELATIHAN TAHUN 2024

- WORKSHOP PRA-IJTIMA' DSN  
MUI.

### RANGKAP JABATAN

TIDAK MEMILIKI RANGKAP JABATAN.

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

AKTA RUPS NOMOR 212 TANGGAL 28 MEI 2024.

### PERIODE JABATAN

2024-2029.

### REKOMENDASI DEWAN SYARIAH MUI

TANGGAL 24 JANUARI 2019.

### PERSETUJUAN BANK INDONESIA

2008.

### HUBUNGAN AFILIASI

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.



# Samsi, SHi, MA

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH

### RIWAYAT PENDIDIKAN

#### INSTITUT PTIQ JAKARTA

Doktor (S3)  
2022

#### INSTITUT ILMU AL-QURAN

Magister Agama (S2)  
2013

#### STAI DARUNNAJAH

Sarjana (S1)  
2002

### RIWAYAT PEKERJAAN

#### MTSN 1

Pengajar  
2002-sekarang

#### STAI APRILESMA

Dosen  
2013-2016

### RANGKAP JABATAN

TIDAK MEMILIKI RANGKAP JABATAN.

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

AKTA RUPS NOMOR 212 TANGGAL 28 MEI  
2024.

### PERIODE JABATAN

2024-2029.

### REKOMENDASI DEWAN SYARIAH MUI

TANGGAL 24 JANUARI 2019

### SERTIFIKASI

- SERTIFIKAT WEBINAR WORKSHOP PRA-IJTIMA' DAN IJTIMA' SANAWI TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024.
- STANDARISASI DA'I MAJELIS ULAMA INDONESIA TAHUN 2023
- STANDARISASI ASESOR SEKOLAH JENJANG SMP/MTS TAHUN 2016
- PELATIHAN DASAR PEMBIAYAAN SYARIAH TAHUN 2023
- PELATIHAN CALON PENGAWAS MADRASAH OLEH PUSAT PENDIDIKAN, PELATIHAN TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN DAN KEAGAMAAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2022
- INOVASI PRODUK BMT DAN KOPERASI SYARIAH TAHUN 2024 OLEH IQTISHAD CONSULTING INDONESIA
- SEMINAR NASIONAL KEPAILITAN SYARIAH TAHUN 2024
- STUDI NASKAH KITAB AL I'JAZ AL IQTISHADY LIL QUR'AN AL KARIM 2025.
- SHARIA ECONOMIC WEBINAR BASYARNAS MUI OLEH ABQORY TRAINING AND CONSULTING 2024.
- WEBINAR KUPAS TUNTAS AKAD MUSYARAKAH DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH.

### PELATIHAN TAHUN 2024

WORKSHOP PRA-IJTIMA' DSN MUI.

### PERSETUJUAN OJK

2019

### HUBUNGAN AFILIASI

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.



# M Nizar Mustaqim

## DIREKTUR UTAMA

### RIWAYAT PENDIDIKAN

**INDONESIA BANKING SCHOOL**  
Magister Management  
2025

**UNIVERSITAS PADJAJARAN**  
Sarjana Peternakan  
2003

### RIWAYAT PEKERJAAN

**PT BPRS HIJRA ALAMI**  
Direktur Utama  
2021-2024

**PT BPRS HIJRA ALAMI**  
Head of Corporate Strategy and Development  
S.d Agust 2025

**PT ALAMI TEKNOLOGI SHARIA**  
Head of Marketing and PDA  
2021- Feb 2025

**PT MULTIDAYA TEKNOLOGI NUSANTARA**  
VP of Feed and Fund  
2020-2021

**PT ALAMI FINTECH SHARIA**  
Head of Product  
2018-2020

**PT INVESTREE RADHIKA JAYA**  
Credit Manager  
2017-2018

**PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK**  
SME and Commercial Financing  
2014-2017

### SERTIFIKASI

- SERTIFIKASI KOMPETENSI BPRS-CERTIF (2025).
- SERTIFIKASI SETINGKAT DIREKSI/ KOMISARIS-REGULASI UMUM LPBBI – AFPI (2024).
- SERTIFIKASI METODOLOGI PELATIHAN – BNSP (2024).
- FINANCE STRATEGIES FOR BUSINESS LEADERS – LINKEDIN (2022).
- CRITICAL THINKING AND PROBLEM SOLVING – LINKEDIN (2021).
- PELATIHAN DAN SERTIFIKASI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) FINTECH – DSN MUI (2019)

### RANGKAP JABATAN

TIDAK MEMILIKI RANGKAP JABATAN.

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

AKTA RUPS NOMOR 210 TANGGAL 25 SEPTEMBER 2025

### PERIODE JABATAN

2025-2029.

### PERSETUJUAN OJK

TAHUN 2025.

### HUBUNGAN AFILIASI

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.



# Tri Israharjo Santoso

## DIREKTUR KEPATUHAN

### RIWAYAT PENDIDIKAN

**INDONESIA BANKING SCHOOL**  
Magister Management  
2025

**UNIVERSITAS PADJAJARAN**  
Sarjana Peternakan  
2003

### RIWAYAT PEKERJAAN

**PT BPRS HIJRA ALAMI**  
Direktur Utama  
2021-2024

**PT MASLAHAT INDONESIA MANDIRI**  
Direktur Utama  
2018-2021

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
Commercial Business Manager/CBC Head  
2016-2018

**PT BANK MEGA SYARIAH**  
Regional Head Jakarta  
2014-2016

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Kepala Cabang  
2013-2014

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Marketing Manager  
2009-2012

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Senior Account Officer  
2008-2009

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Pjs Kepala KCP Metro Lampung  
2007-2008

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Pjs Manager Operasional Cabang Bandar Lampung  
2006

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Marketing Officer  
2005- 2007

**PT BANK SYARIAH MANDIRI**  
Management Trainee  
2004-2005

### SERTIFIKASI

- SERTIFIKAT CYBER SECURITY, MITRASOFT (2023).
- SERTIFIKAT IT GOVERNANCE, MITRASOFT (2023).
- SERTIFIKAT DIGITALISASI BPRS, MITRASOFT (2023).
- SERTIFIKAT KOMPETENSI DIREKTUR TINGKAT 1 DAN TINGKAT 2, LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CERTIF (2021).
- SERTIFIKAT FINTECH P2P LENDING DASAR, ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA (2019).

### RANGKAP JABATAN

TIDAK MEMILIKI RANGKAP JABATAN.

### DASAR HUKUM PENGANGKATAN

AKTA RUPS NOMOR 55 TANGGAL 17 APRIL TAHUN 2024.

### PERIODE JABATAN

2024-2029.

### PERSETUJUAN OJK


TAHUN 2024.

### HUBUNGAN AFILIASI

Tidak Memiliki Hubungan Keluarga dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Bank Hijra.



## **PT BPRS HIJRA ALAMI**

 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310